

Dampak Krisis Di Indonesia Yang Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental

by Firda Ananda Yulia Sari

Submission date: 04-Jun-2024 10:27PM (UTC-0500)

Submission ID: 2395862496

File name: ARTIKEL_FIRDA_Hal_102-111.docx (52.33K)

Word count: 3226

Character count: 21218



Dampak Krisis Di Indonesia Yang Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental

Firda Ananda Yulia Sari, Rizky Himawan Saputra, Muhammad Yasin

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Korespondensi Penulis : yasin@untag-sby.ac.id

Abstract. *The economic crisis that hit Indonesia has resulted in fundamental fragility in various aspects of state life. The impact of this crisis is not only limited to the economic sector, but also extends to the social, political and government sectors. This research analyzes how the crisis affects the economic structure, political stability and social welfare of society. Through a qualitative approach using case study methods, this research found that the fundamental fragility that occurred was caused by weak economic infrastructure, rampant corruption and ineffective government policies. In addition, this crisis exacerbates social inequality and results in increasing poverty and unemployment rates. This study recommends the need for structural reforms and more inclusive and transparent policies to mitigate the impact of the crisis and strengthen Indonesia's fundamental foundations.*

Keywords: *Economic Crisis, Fundamental Fragility, Indonesia.*

Abstrak. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah mengakibatkan kerapuhan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Dampak krisis ini tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga meluas ke bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Penelitian ini menganalisis bagaimana krisis tersebut mempengaruhi struktur ekonomi, stabilitas politik, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa kerapuhan fundamental yang terjadi disebabkan oleh lemahnya infrastruktur ekonomi, korupsi yang merajalela, dan kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Selain itu, krisis ini memperburuk ketimpangan sosial dan mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi struktural dan kebijakan yang lebih inklusif serta transparan untuk memitigasi dampak krisis dan memperkuat fondasi fundamental Indonesia.

Kata Kunci: Krisis Ekonomi, Kerapuhan Fundamental, Indonesia.

PENDAHULUAN

Krisis yang dialami suatu negara akan mempengaruhi suatu fundamental atau pondasi suatu negara karena dampak yang diberikan begitu besar dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dinegara tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Krisis ekonomi juga merupakan salah satu hal yang paling ditakuti oleh negara di seluruh dunia. Karena apabila hal tersebut terjadi, kerugian akan menimpa pemerintah dan masyarakat sekaligus. Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami

Received April 22, 2024; Accepted Juni 05, 2024; Published Juli 31, 2024

* Firda Ananda Yulia Sari, yasin@untag-sby.ac.id

7 penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB (produk domestik bruto), anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Dampak inflasi pada individu dengan pendapatan tetap atau tidak mengalami kenaikan pendapatan adalah orang tersebut cenderung mengurangi jumlah barang yang dikonsumsi. Ada sebagian orang akan mengurangi tabungan dan investasinya, atau bahkan mencairkan tabungan dan investasinya, untuk mempertahankan sebagian pola konsumsinya. Terlihat dampak inflasi cenderung buruk bagi perekonomian karena kenaikan harga cenderung menurunkan output dari perekonomian. Ketika perekonomian diukur dengan harga konstan, maka akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, akan menyebabkan ekonomi bertumbuh negatif. Masyarakat yang menghadapi krisis juga akan melakukan hal yang hampir sama. Mulai dari mengurangi konsumsi, mengurangi utang dan menaikkan tabungan. Hampir semua aktivitas yang perusahaan dan masyarakat lakukan ketika menghadapi krisis cenderung menurunkan output perekonomian. Ketika sebagian besar masyarakat dan pebisnis percaya akan ada krisis ekonomi, besar kemungkinan perekonomian benar-benar akan mengalami krisis. Kejadian ini memang sangat menakutkan. Sebab, akan ada banyak sekali pihak yang dirugikan jika sampai terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Gejala yang muncul saat krisis ekonomi biasanya diawali oleh penurunan belanja dari pemerintah. Lalu, jumlah pengangguran melebihi 50% dari jumlah tenaga kerja. Selain itu, terjadi pula kenaikan harga pokok yang semakin meroket, penurunan konsumsi yang rendah, penurunan nilai tukar yang tidak terkontrol, dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang drastis. Oleh karena itu, mengapa krisis yang dialami suatu negara akan mempengaruhi suatu fundamental atau pondasi suatu negara karena dampak yang diberikan begitu besar dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di negara tersebut, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Pada penelitian ini akan dianalisis faktor apa saja yang membuat krisis-krisis tersebut bisa terjadi di Indonesia dan bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi fundamental suatu negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Krisis pada tahun 1960-1965 dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 1960-1965
2. Krisis pada tahun 1998-1999 dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 1998-1999

3. Krisis ekonomi pada tahun 2008 dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 2008
4. Krisis ekonomi pada tahun 2013 dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 2013
5. Krisis ekonomi pada tahun 2020-2021 dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 2020-2021

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis krisis yang terjadi pada tahun 1960-1965 serta upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 1960-1965
2. Untuk menganalisis krisis yang terjadi pada tahun 1998-1999 serta upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 1998-1999
3. Untuk menganalisis krisis yang terjadi pada tahun 2008 serta upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 2008
4. Untuk menganalisis krisis yang terjadi pada tahun 2013 serta upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 2013
5. Untuk menganalisis krisis yang terjadi pada tahun 2020-2021 serta upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 2020-2021

PEMBAHASAN

1. Krisis pada tahun 1960-1965

Pada tahun 1965 dimana pada saat orde lama masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat hebat. Krisis ini sering disebut dengan "Hiperinflasi Indonesia 1963-1965" dimana nilai mata uang Rupiah mengalami inflasi hingga 600%. Bahkan pada saat itu terjadi penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil (Redenominasi) dari Rp 1000 menjadi Rp 1. Adanya inflasi yang tinggi, penyebab utama inflasi tinggi pada tahun 1960-an karena sistem ekonomi terpimpin yang lebih mengutamakan pembangunan proyek politik ketimbang pembangunan ekonomi. Krisis ekonomi 1965 ini latar belakang oleh kondisi politik negara ditandai oleh ketidakjelasan dan ketidakstabilan yang besar pada awal

kemerdekaan tahun 1950an. Pada saat itu terjadi banyak pemberontakan yang membuat terhambatnya ekonomi pada tahun 1950an. Terlebih anggaran negara kebanyakan di salurkan untuk kebutuhan militer, hal ini menyebabkan semakin sedikitnya anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya krisis di tahun 1960-1965 yakni pada tahun tersebut mengalami krisis puncak pada saat 1960an, barang-barang ekspor mengalami penurunan harga, khususnya ekspor karet dan tambang yang merupakan pemasukan ekspor terbesar pada saat itu. Akibatnya peredaran mata uang rupiah di masyarakat pun tak terkontrol dan harga-harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Bahkan nilai beras saat itu lebih berharga daripada mata uang rupiah. Pemerintah lalu melakukan Redenominasi yang memotong nilai mata uang dari Rp.1000 menjadi Rp.1 tetapi kebijakan tersebut malah semakin memperparah laju inflansi. Indonesia pun terus mengalami inflansi dan pada tahun 1965 inflansi Indonesia menyentuh 600%. Hutang luar negeri Indonesia pun menjadi semakin membengkak hingga mengalami defisit.

Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 1960-1965

Pemerintah segera melakukan kebijakan pengetatan moneter agar negara tidak semakin terbenam dalam krisis. Sanering atau pemotongan nilai mata uang mulai diterapkan terhitung sejak 25 Agustus 1959. Uang pecahan 500 dan 1.000 rupiah diturunkan nilainya 10 persen, menjadi 50 rupiah dan 100 rupiah. Dengan kata lain, nilai uang dipangkas hingga 90 persen. Sanering—yang oleh pemerintah disebut dengan istilah “penyehatan uang”—ditempuh untuk mencegah inflasi semakin tinggi, mengendalikan harga, meningkatkan nilai mata uang, dan memungut keuntungan tersembunyi dari perdagangan. Pemerintah membekukan 90 persen giro dan deposito di bank di atas 25.000 rupiah dan menukarnya dengan surat utang. Bersamaan dengan itu, dilakukan devaluasi dari 11,4 rupiah menjadi 45 rupiah per dolar AS. Boediono dalam bukunya menilai, ini langkah “tanggung” karena di pasar bebas waktu itu kurs sudah mencapai sekitar 150 rupiah per dolar AS (hlm. 100).

2. Krisis pada tahun 1998-1999

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 ini sebenarnya merupakan bagian dari krisis Finansial Asia (Asian Financial Crisis) yang merupakan kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas dan kebijakan pemerintah yang lemah. Pada saat itu terjadi penurunan mata uang rupiah mengalami inflasi sekitar 70%, banyak perusahaan khususnya yang memiliki pinjaman dalam mata uang dolar AS mengalami kebangkrutan karena nilai utangnya membengkak. Hal ini pun menyebabkan PHK massal yang menyebabkan

jumlah pengangguran mencapai sekitar 14 juta orang, melemahnya nilai Rupiah dari Rp.4000 per dollar menjadi Rp.16000 per dollar, dan terjadi bentrok antara aparaturnegara dengan masyarakat sepanjang 1998. Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sangat besar. Hal ini menyebabkan PHK massal yang menyebabkan jumlah pengangguran mencapai sekitar 14 juta orang, melemahnya nilai Rupiah dari Rp.4000 per dollar menjadi Rp.16000 per dollar, dan terjadi bentrok antara aparaturnegara dengan masyarakat sepanjang 1998. Ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bertumbangan pada krisis tahun 1998. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak bangkrut. Kemudian, pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yaitu sekitar 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja. Akibat itu, angka kemiskinan pun juga meningkat. Tercatat, angka kemiskinan pada tahun 1998 mencapai sekitar 50% dari total penduduk. Melihat dampak tersebut, saat ini pemerintah sedang berusaha dengan maksimal agar krisis pada tahun 1998 tidak akan terulang lagi.

Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 1998-1999

Saat krisis ekonomi 1998 terjadi, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki Sistem Perbankan. Saat itu, salah satu penyebab terjadinya krisis adalah rusaknya sistem perbankan nasional. Ada banyak praktik perbankan tidak sehat yang dijalankan, lemahnya penegakan hukum serta masalah independensi bank sentral. Sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi tersebut, IMF, dan Indonesia sepakat untuk menutup beberapa bank yang bermasalah. Selain itu, pemerintah juga membentuk BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk melakukan restrukturisasi perbankan nasional secara menyeluruh.

b. Restrukturisasi Utang Swasta. Hal ini adalah upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi 1998. Berdasarkan data dari World Bank, total utang luar negeri Indonesia hingga Maret 1998 adalah sebesar 138 miliar dollar AS. Dari total jumlah tersebut, sebesar 64,5% miliar dolar AS adalah utang perusahaan swasta. Dengan nilai tukar rupiah yang merosot tajam, tentu perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut. Inilah mengapa, restrukturisasi akhirnya dilakukan. Harapannya adalah agar posisi likuiditas perusahaan bisa terjaga sehingga tidak terjadi gangguan produksi dan minim PHK. Pada Januari 1998, pemerintah akhirnya ikut andil dalam penyelesaian masalah utang ini. Dalam hal ini, tim

Penyelesaian Utang Luar Negeri Swasta berhasil mencapai kesepakatan yang mencakup pembiayaan perdagangan, pinjaman perusahaan swasta, dan penyelesaian pinjaman antar bank.

c. Makro Ekonomi. Dalam krisis ekonomi 1998, tidak hanya bank dan perusahaan saja yang mengalami kesusahan. Masyarakat dan rakyat kecil khususnya, juga ikut menderita karena krisis. Menurut data dari BPS, jumlah penduduk miskin meningkat dari 17,47% menjadi 24,20%. Akhirnya, sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, APBN diperlonggar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Defisit APBN diperlonggar menjadi 8,5% di PDB untuk membiayai program Jaringan Pengaman Nasional dan penyediaan kebutuhan pokok.

3. Krisis pada tahun 2008

Krisis keuangan pada 2008-2009 juga berdampak besar kepada Indonesia, tetapi dampaknya lebih dirasakan sektor keuangan. Krisis ekonomi Indonesia pada tahun 2008 disebabkan sentimen eksternal, yakni dari perusahaan global Lehman Brothers yang melakukan produk investasi derivatif. Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, saat itu Indonesia belum memiliki pengawasan bank, alhasil kepanikan global akibat jatuhnya Lehman Brothers turut berdampak pada Indonesia, dengan anjloknya nilai tukar. Krisis keuangan 2008-2009 dipicu oleh kredit macet di sektor properti AS (subprime mortgage). Krisis tersebut kemudian menumbangkan sejumlah perusahaan seperti Lehman Brothers. Akibat dari krisis tersebut, ekonomi AS berkontraksi 0,34% pada 2008 dan 3,07% pada 2009. Pertumbuhan ekonomi global juga menurun menjadi 2,8% pada 2008 dari 5,42% pada 2007. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri melambat menjadi 4,5% pada 2009 dari 6,1% pada 2008. Pertumbuhan Indonesia pada 2009 menjadi yang tertinggi ketiga di dunia setelah China dan India. Krisis finansial tersebut tidak hanya menghancurkan sendi-sendi sektor keuangan tetapi juga berdampak pada sektor riil domestik Indonesia. Selain itu ditemukan krisis global relatif lebih kuat dampaknya terhadap rumah tangga pedesaan daripada rumah tangga perkotaan. Namun karena pasar kerja di pedesaan lebih fleksibel, dampak krisis terhadap tingkat pengangguran pedesaan menjadi relatif lebih lemah. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 6,1%, Cadangan devisa negara menjadi 56,7 miliar USD dari tahun sebelumnya 51,6 miliar USD, Inflasi juga mencapai 11,06% yang dipicu karena kenaikan harga komoditas dan minyak, Rasio utang terhadap PDB menjadi 33%, dan juga Harga minyak ikut terdampak dan turun di bawah 100 dolar AS per barel yakni ke level 95,71 dolar AS per barel.

Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pada tahun 2008

Berbeda dengan tahun 1998, krisis 2008 ini hanya berdampak sesaat. Saat itu, untuk menghadapi krisis, ada beberapa cara yang dilakukan, yakni:

- a. Pemerintah Mengeluarkan Tiga Perppu. Peraturan pertama yang dikeluarkan adalah Perppu 2/2008. Aturan ini dibuat untuk memperkuat fungsi lender of the last resort BI dengan memperluas macam aset yang bisa dijadikan agunan dalam Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP). Kemudian, Perppu 3/2008 dibuat untuk memperkuat peran LPS di masa krisis. Ketiga, Perppu 4/2008 menetapkan mekanisme, tata cara dan koordinasi antar lembaga yang berwenang mencegah serta menangani krisis.
- b. Menurunkan Giro Wajib Minimum. Pada Oktober 2008, BI menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dari 9% ke 7% dan kewajiban valas dari 3% menjadi 1%.

4. Krisis pada tahun 2013

Pada 2013, rupiah melemah hingga ke kisaran 18%. Aksi jual di pasar obligasi membuat yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik sampai 250 basis poin (bps). Pada 2013, posisi cadangan devisa menyentuh US\$ 93 miliar tahun 2013, periode Mei-November, BI menaikkan suku bunga acuan hingga 175 bps. Keluarnya sejumlah besar investasi portofolio asing dari Indonesia akibat rencana pengurangan QE oleh the Fed; dan juga neraca nilai perdagangan Indonesia yang defisit. Pada krisis ekonomi 2013, negara sudah mencatatkan defisit hingga US\$ 3,31 miliar di semester pertama. Defisit tersebut berasal dari aktifitas ekspor Indonesia yang berada di angka US\$ 91,05 miliar. Pada kuartal kedua 2013, neraca transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit US\$ 9,9 miliar yang setara 4,5 % PDB. Jumlah itu mengalami peningkatan 69 % dari kuartal sebelumnya, yakni US\$ 5,8 miliar. Defisit tersebut sekaligus melanjutkan defisit transaksi berjalan selama tujuh kuartal terakhir. Dampak dari adanya krisis tersebut, banyak investor yang berbondong-bondong meninggalkan negara berkembang dan kembali ke AS karena dianggap sebagai tempat investasi paling aman. Arus modal yang berkurang akhirnya berdampak pada pasar keuangan domestik dan menyebabkan IHSG serta nilai tukar rupiah melemah cukup dalam. Rupiah pada tahun 2013 melemah hingga 21%, yakni Rp12.180 per dollar AS. Krisis yang terjadi pada tahun 2013 ini dampaknya adalah terjadinya kenaikan harga komoditi impor, baik yang menjadi obyek konsumsi maupun alat produksi. Adapun kenaikan harga alat-alat produksi impor bisa berdampak pada kenaikan harga komoditi yang diproduksi di dalam negeri, tetapi (sebagian besar) alat-alat produksinya impor; dan juga

kenaikan nominal Rupiah dari utang luar negeri. Kedua dampak ini, pada gilirannya, akan memukul berbagai lapisan masyarakat.

Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 2013

Keluarnya arus modal mengakibatkan melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melakukan perlambatan ekonomi agar tidak terjadi overheating. Sebagai dampak dari adanya perlambatan ini, aktivitas bisnis pun menurun. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran, pemerintah memberikan intensif pada dunia usaha agar dapat bertahan tanpa harus melakukan PHK.

5. Krisis pada tahun 2020-2021

Krisis tahun 2020 terjadi ketika ekonomi tumbuh negatif dua kuartal beruntun. Pada 2020 lalu dunia mengalami resesi akibat pandemi Covid-19, menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan banyak pegawai dirumahkan. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun macet. Pada 2020 lalu dunia mengalami resesi akibat pandemi Covid-19, sekarang resesi terjadi karena tingginya inflasi akibat harga komoditas energi yang melesat. Inflasi merupakan kondisi naiknya harga barang dan jasa selama periode tertentu. Inflasi yang berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di lain sisi, produksi barang dan jasa bakal menurun. Ini masuk dalam kategori berbahaya karena akan memicu pengangguran, kemiskinan. Karena krisis pada tahun 2020 karena adanya pandemi, data BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020, yakni sebesar -2,07%. Alhasil, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena pergerakan yang kurang stabil. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Macetnya roda ekonomi membuat produksi turun sehingga banyak yang masyarakat yang terkena PHK karena banyak perusahaan mengalami kerugian hingga bahkan bangkrut dan akhirnya membuat pengangguran semakin bertambah.

Upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi pada tahun 2020-2021

Di 2020, cara pemerintah mengatasi krisis ekonomi adalah dengan menggerakkan ekonomi nasional yang sempat beku akibat pandemi. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp172,1 triliun untuk bantuan masyarakat agar mereka

memiliki daya beli. Selain itu, pemerintah juga berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian intensif kepada korporasi maupun UMKM. Sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga dan melakukan pembelian Surat Berharga Negara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas keuangan sehingga mendorong aktivitas dunia usaha. Itulah sederet upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Cara mengatasi krisis ekonomi yang dilakukan pemerintah bervariasi dan menyesuaikan dengan masalah saat itu hingga akhirnya kita masyarakat Indonesia bisa dalam keadaan perekonomian seperti saat ini. Dan tentu kedepannya pemerintah akan terus berupaya agar krisis-krisis global maupun nasional bisa teratasi atau bahkan terhindari dampaknya secara langsung terhadap masyarakat sehingga menyebabkan berbagai masalah atau justru dapat membuat terjadinya kerapuhan fundamental di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa krisis-krisis yang pernah terjadi di Indonesia memberikan dampak terhadap kerapuhan fundamental suatu negara, fundamental sendiri disini sebagai dasar suatu negara dalam hal kehidupan sosial maupun ekonominya. Sehingga apabila suatu negara mengalami suatu krisis ekonomi tentunya hal tersebut akan dapat membuat kerapuhan dalam fundamental suatu negara. Saat terjadinya krisis-krisis di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lemahnya sistem yang ada di Indonesia pada saat tahun 1960-1965, Adanya kombinasi yang parah antara perilaku pasar keuangan di luar batas, kebijakan pemerintah yang lemah, dan inflasi yang tinggi pada saat tahun 1998-1999, Adanya kredit macet dan sentimen eksternal yang membuat anjloknya nilai tukar ditahun 2008, nilai rupiah yang melemah ditahun 2013, dan yang paling tidak terduga karena adanya pandemi yang menyerang seluruh negara yang membuat segala perputaran kehidupan menjadi terhambat di tahun 2020. Segala penyebab tersebut tentunya memiliki dampak yang berbeda-beda tetapi, segala permasalahan tersebut dapat memicu terjadinya inflasi, deflasi, bahkan resesi yang membuat krisis masyarakat maupun pemerintah sehingga dapat memunculkan berbagai masalah ekonomi dan sosial didalam suatu negara yang apabila tidak diupayakan untuk diatasi maka fundamentalnya bukan hanya rapuh tetapi dapat hancur, berantakan dan tidak terkontrol. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sudah berupaya mencari cara dan melakukan sesuatu untuk mengatasi krisis yang mana cara yang

dilakukan pemerintah bervariasi dan menyesuaikan dengan masalah saat itu agar dampak dari krisis-krisis tersebut tidak sampai membuat terjadinya kerapuhan fundamental di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adieb, Maulana. (2023). Krisis Ekonomi. Glints: diakses dari <https://glints.com/id/lowongan/krisis-ekonomi/Kwee>, Hans. (2022). Krisis Ekonomi 2023. BusinessInsight: diakses dari <https://insight.kontan.co.id/news/krisis-ekonomi-2023>.
- Setiawan, Verda Nano. (2022). Dunia di Bibir Jurang Resesi, Lebih Ngeri dari 1998 & 2008?. CNBCIndonesia: diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221001090436-4-376432/dunia-di-bibir-jurang-resesi-lebih-nger-dari-1998-2008>.
- Hussein, Mohamad Zaki. (2013). Krisis Mata Uang Rupiah 2013: Penyebab dan Dampaknya. IndoProgress: diakses dari <https://indoprogress.com/2013/09/krisismata-uang-rupiah-2013-penyebab-dan-dampaknya/>
- Idris, Muhammad. (2020). Apa Saja yang Terjadi Saat Resesi Ekonomi Indonesia Tahun 1998?. kompascom: diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/06/082004526/apa-saja-yang-terjadi-saat-resesi-ekonomi-indonesiatahun-1998?page=all>
- Nugroho, V., & Ramli, I. (2016). Krisis Ekonomi Krisis Politik Dunia Dan IHSG. Jurnal Ekonomi, 21(1), 61-75.
- Pramisti, Nurul Qomariyah. (2020). Krisis Finansial 2008, Bagaimana Indonesia Mengatasinya?. tirtoid: diakses dari <https://tirto.id/krisis-finansial-2008-bagaimana-indonesia-mengatasinya-f7qD>
- Sari, P. K., & Fakhruddin, F. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun (1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 1(2), 377-388.
- Yesidora, Amelia (2022). Mengenal Perjalanan Krisis Ekonomi di Indonesia. Katadata: diakses dari <https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/62b0889cd7310/mengenal-perjalanan-krisis-ekonomi-di-indonesia>
- Puspita, Ni Ketut Candra. (2021). Ini Deretan Krisis yang Pernah Terjadi di Dunia Ada Krismon hingga Housing Bubble. IDX Chanel: diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/ini-deretan-krisis-yang-pernah-terjadidi-dunia-ada-krismon-hingga-housing-bubble>

Dampak Krisis Di Indonesia Yang Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	katadata.co.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	www.vibiznews.com Internet Source	3%
4	radityasitohang.blogspot.com Internet Source	2%
5	bajangjournal.com Internet Source	2%
6	Submitted to Telkom University Student Paper	2%
7	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
8	klikpositif.com Internet Source	2%
9	www.bbc.com Internet Source	2%

10

www.djkn.kemenkeu.go.id

Internet Source

2%

11

www.merdeka.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Dampak Krisis Di Indonesia Yang Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
